

POTRET MODEL PENGELOLAAN PENDIDIKAN UNKLUSI

Nurwahidah¹, Nur Ilma Kusjayanti², Ahlun Ansar³, Muh. Fadhl Al-jentak⁴,
Arismunandar⁵

Universitas Negeri Makassar¹

Universitas Negeri Makassar²

Universitas Negeri Makassar³

Universitas Negeri Makassar⁴

Universitas Negeri Makassar⁵

Alamat e-mail : ¹ nurwahidahhh2327@gmail.com

Alamat e-mail : ² nurilmakusjayanti12@gmail.com, ³ ahlunansar@unm.ac.id, ⁴ muhfadhldgtarang@gmail.com, ⁵ arismunandar@unm.ac.id

ABSTRACT

Education is a fundamental right for every citizen, including children with special needs (ABk), which is expressly mandated in Law no. 20 of 2003 concerning the national education system. This study was designed to delve deeper into the implementation of inclusive education at the UPT SPF SDN IKIP I Makassar City. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through semi-structured interviews with the principal and class teachers who handle students with special needs (ABK). The research findings indicate that the implementation of inclusive education still faces significant challenges, such as the absence of specific policies, an unstandardized PPDB process, an unadapted curriculum, limited facilities, a lack of teacher training, and minimal collaboration with external parties. These findings indicate the need to strengthen the management of inclusive education, improve the quality of human resources, provide adequate facilities, and strengthen collaboration with parents and external parties. This study recommends the development and implementation of comprehensive inclusive policies and the improvement of teacher competency through continuous training.

Keywords: *Inclusive Education, Implementation, Children with Special Needs*

ABSTRAK

Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara, termasuk anak yang berkebutuhan khusus (ABK), yang secara tegas di amanatkan dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Penelitian ini di rancang untuk menggali lebih dalam implementasi pendidikan inklusif di UPT SPF SDN IKIP I Kota Makassar . Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan kepala sekolah dan guru kelas yang menangani siswa berkebutuhan khusus (ABK). Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan signifikan, seperti tidak adanya kebijakan khusus, proses PPDB yang belum terstandarisasi, kurikulum yang belum diadaptasi, fasilitas yang terbatas, kurangnya pelatihan guru, dan minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan pengelolaan pendidikan inklusif, peningkatan kualitas sumber

daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, dan penguatan kolaborasi dengan orang tua dan pihak eksternal. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan dan implementasi kebijakan inklusif yang komprehensif serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan inklusi, implemenktasi, Anak Berkebutuhan khusus

A. Pendahuluan (12 pt dan Bold)

Pendidikan adalah proses memberikan usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan kepada anak. Bantuan ini bertujuan untuk mengarahkan dan membina kecerdasan materi, etika, perilaku sosial, cara berinteraksi, serta pengelolaan emosi pada anak. Dengan demikian, anak diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan aturan sosial di sekitarnya (Sholawati, 2019). Dengan mendapatkan pendidikan individu bisa memperoleh pengetahuan, sikap positif, nilai-nilai dan keterampilan yang esensial untuk menjalani kehidupan yang berkelanjutan dan bermakna. Berinvestasi dalam pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia, membekali mereka dengan keahlian dan kemampuan untuk memajukan bangsa (Andriani, 2024). UU No. 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa seluruh WNI, baik itu warga biasa maupun anak yang

berkebutuhan khusus atau yang memerlukan layanan khusus, mereka memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana dinyatakan oleh kosasih.

Implementasi pendidikan inklusi di SD IKIP I Makassar menghadapi tantangan yang kompleks, terutama karena di sekolah ini belum adanya kebijakan. Pendahuluan berisi pemaparan yang terkhusus dan panduan tertulis yang memadai terkait penerapan Siswa ABK. Dimana penerimaan siswa ABK di sekolah ini lebih didasarkan pada kewajiban dari pada komitmen yang terencana, meskipun begitu guru menunjukkan inisiatif tinggi dalam menyesuaikan pembelajaran. Adapun kurikulum yang digunakan masih bersifat umum tanpa penyesuaian khusus untuk ABK, serta fasilitas pendukung masih sangat terbatas. Berdasarkan hal ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009

tentang pendidikan inklusif menjadi acuan penting. Permendiknas ini memberikan amanat penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Namun di SD IKIP I Makassar ini implementasi peraturan tersebut belum dioptimalkan. Guru-guru di sana belum mendapatkan pelatihan khusus, sehingga guru di sana hanya bisa mengandalkan pengalaman pribadi dan diskusi antar para guru. Sekolah juga belum menjalin kerja sama dengan pihak-pihak dari luar seperti dinas sosial ataupun SLB, padahal menjalin hubungan dengan pihak luar seperti dinas sosial atau SLB ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif yang efektif, sebagaimana selaras dengan semangat permendiknas 70/2009.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya kebijakan yang jelas menjadi hambatan utama dalam implementasi pendidikan inklusi di Indonesia (Juntak, 2023). Analisis kesenjangan kepada orang tua ABK juga menjadi salah satu kendala, dimana beberapa orang

tua enggan mengakui kondisi anaknya, ini bias menghambat kolaborasi yang efektif. Di sekolah ini juga belum memiliki dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk ABK sehingga ini bisa menjadi salah satu penghambat ABK untuk berkembang ini selaras dengan penelitian (Marsidi, 2022) yang menjelaskan bahwa kurangnya fasilitas dan dukungan yang memadai menjadi hambatan serius dalam penyelenggaraan pendidikan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 70 tahun 2019 tentang pendidikan inklusif menjadi acuan penting, namun implementasinya belum optimal di banyak sekolah, Penelitian lain menyoroti tantangan seperti penerimaan ABK yang belum terencana dengan baik, kurikulum yang belum disesuaikan serta kurangnya kolaborasi dengan orang tua dan pihak eksternal (Rohimah et al., 2024).

Penelitian ini menyoroti hambatan besar dalam penerapan pendidikan inklusi di SD IKIP I Makassar, yang menunjukkan persoalan mendasar di Indonesia mengenai hak akses pendidikan yang sama bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang belum seragam, kurikulum nasional yang tak disesuaikan, sarana dan bantuan infrastruktur yang terbatas (misalnya ruang belajar khusus dan peralatan bantu), serta tenaga manusia (guru dan Guru Pendamping Khusus) yang kurang terampil serta kerja sama dengan pihak luar, dapat meningkatkan risiko stereotip negatif, perlakuan tidak adil, dan kesenjangan sosial. Hal ini mengganggu pertumbuhan intelektual, sosial, dan emosional ABK, berdampak pada hasil belajar mereka, serta memperlebar jurang nasional, di mana ribuan ABK kehilangan kesempatan pendidikan yang memadai, sehingga mengancam target pembangunan lestari dan efisiensi bangsa.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, untuk memahami implementasi pendidikan inklusi di Sd IKIP I Makassar. Data ini dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan kepala

sekolah dan guru kelas yang berhadapan langsung dengan siswa ABK. dengan menggunakan instrumen penelitian yang mencakup aspek kebijakan sekolah, PPDB, kurikulum, fasilitas, sumber daya manusia, peran orang tua, evaluasi serta tantangan.

Subjek penelitian ini adalah implementasi model pendidikan inklusi di UPT SPF SDN IKIP I Kota Makassar Penelitian akan berfokus pada pengalaman dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa berkebutuhan khusus (ABK), guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, staf pendukung, dan orang tua siswa. Aspek-aspek yang akan diteliti meliputi: (1) kebijakan sekolah (2) PPDB (3) kurikulum (4) ketersediaan fasilitas sarpras (5) sumber daya manusia (GPK) dan (6) Evaluasi pembelajaran Terkait analisis data yang digunakan yaitu analisis konten, dimana jawaban wawancara diidentifikasi, dikategorikan/dikelompokkan serta diinterpretasikan berdasarkan tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yang

membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan agar memastikan konsistensi dan akurasi temuan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan sekolah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara memperlihatkan bahwa implementasi pendidikan Berdasarkan hasil observasi dan wawancara memperlihatkan bahwa implementasi pendidikan inklusi di SD IKIP I Makassar ini masih menghadapi beberapa tantangan yang kompleks. Implementasi pendidikan di sekolah ini berjalan cukup sederhana dan belum terstruktur sepenuhnya, temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervianti (2018) yang mengatakan bahwa pelaksanaan program pembelajaran inklusi belum memenuhi seluruh standar nasional pendidikan. Penelitiann juntek et al (2023) menyoroti bahwa kurangnya kebijakan yang jelas menjadi hambatan utama dalam implementasi pendidikan inklusi di indonesia. Kahiruddin (2020) dalam penelitiannya menggaris bawahi penitngnya kebijakan komperehensif

sebagai landasan untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Beberapa peenelitian ini selaras dengan sama-sama menyoroti pentingnya kebijakan yang jelas dan komphrensif dalam mendukung implementasi pendidikan inklusi.

PPDB

Tantangan utama yang terjadi di SD IKIP I Makassar ini yaitu belum adanya kebijakan khusus atau panduan tertulis mengenai penerapan pendidikan inklusi, ini sejalan dengan penelitian Irvandi (2024) yang mengemukakan bahwa proses PPDB yang tidak terstandarisasi dan kurangnya asesmen yang komprehensif dapat menghambat identifikasi dini kebutuhan siswa ABK. Hal ini mengakibatkan penerimaan siswa ABK di sekolah ini lebih didasarkan pada kewajiban daripada komitmen yang terencana dengan baik. Kondisi ini diperkuat lagi dengan adanya temuan bahwa proses penerimaan siswa ABK nya sama dengan penerimaan siswa reguler tanpa dipisahkan PPDB nya. Guru di sekolah ini berupaya melakukan identifikasi dan asesmen awal secara sederhana melalui pengamatan perilaku, komunikasi langsung, serta

memberikan tugas menggambar dan menulis. Upaya ini menjadi langkah awal yang penting untuk mengenali potensi ataupun kesulitan belajar pada siswa ABK, meskipun masih terbatas pada observasi dasar. Dengan tidak adanya tim khusus yang menangani penerimaan siswa ABK dan ketiadaan kurikulum yang dirancang secara spesifik membuktikan bahwa perhatian terhadap kebutuhan individual siswa masih sangat perlu untuk ditingkatkan.

Dengan temuan ini mengidentifikasi perlunya penguatan manajemen pendidikan inklusif di sekolah sebagaimana dinyatakan oleh Andriani(2024) dalam artikelnya, berinvestasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membekali mereka dengan kemampuan dan keahlian untuk memajukan bangsa. Yang mana hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa seluruh warga Negara Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus atau yang memerlukan layanan khusus, memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan (Kosasih, 2021).

Kurikulum

Kurikulum yang digunakan masih mengacu pada kurikulum nasional tanpa adanya penyesuaian khusus bagi siswa ABK bisa menjadi salah satu hambatan ini sejalan dengan penelitian (Rohimah et al., 2024) yang menjelaskan bahwa kurikulum yang belum disesuaikan serta kurangnya kolaborasi dengan orang tua dan pihak eksternal. Namun begitu guru berinisiatif menyederhanakan materi, soal dan tugas agar lebih mudah dipahami oleh ABK. Penyusunan rencana pembelajaran (RPP) dilakukan secara mandiri dengan strategi seperti pemberian instruksi sederhana, penggunaan media visual, serta pendekatan personal yang bisa mendorong partisipasi aktif siswa. Kolaborasi yang dilakukan antara guru pendamping dan guru kelas dalam RPP sudah merupakan langkah tepat dan positif namun, pelaksanaannya perlu diperluas lagi dengan melibatkan orang tua serta tenaga ahli agar kebutuhan siswa dapat diakomodasi secara lebih komprehensif. Sejalan dengan penelitian (Juntak, J. N. S., 2023) terkait penyesuaian kurikulum sangat

penting agar siswa ABK dapat mengakses materi pelajaran yang efektif.

Fasilitas dan dukungan

Fasilitas dan dukungan bagi siswa-siswa ABK di SD IKIP I Makassar ini masih sangat terbatas. Sekolah masih belum memiliki ruang belajar atau alat bantu khusus serta sebagian besar wali kelas harus mengelola kegiatan belajar tanpa bantuan GPK. Bahkan proses perekrutan guru pendamping dilakukan langsung oleh orang tua siswa ABK yang ini bisa saja berpotensi menimbulkan masalah terkait kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik tersebut. Media pembelajaran yang digunakan pun masih sederhana, sementara dukungan transportasi maupun kebutuhan tambahan siswa yang lainnya sebagian besar ditanggung oleh orang tua siswa-siswi ABK. Kondisi ini menggambarkan bahwa penerapan pendidikan inklusif masih membutuhkan dukungan serta perhatian seperti sarana dan prasarana yang memadai. Ini erat kaitannya dengan penelitian (Marsidi, 2022) yang membahas terkait kurangnya fasilitas dan dukungan yang memadai bisa menjadi

hambatan serius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebaliknya disarankan untuk sekolah ini agar kedepannya lebih memperhatikan dukungan sarpras untuk ABK demi kesejahteraan dan perkembangan ABK sebagian yang dijelaskan oleh (Mallappiang, 2024) dalam penelitiannya bahwa dukungan sarana prasarana yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang belajar inklusif.

Sumber daya Manusia (Guru dan GPK)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama guru kelas yang menangani langsung ABK menjelaskan bahwa guru-guru jarang mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendidikan inklusif, ini bisa mempengaruhi masa perkembangan ABK karena tidak ditangani langsung oleh ahlinya sebagaimana yang dijelaskan oleh (Juntak. 2023) dalam penelitiannya terkait kurangnya pelatihan guru menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusi. Dalam penelitian lain juga menjelaskan bahwa kompetensi guru dalam pendidikan

inklusi perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan (Maryam, M., 2025). Hal ini menyebabkan mereka harus belajar secara mandiri melalui pengalaman dan berbagi praktik dengan rekan sejawat. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh guru yaitu ketika menghadapi perilaku siswa ABK yang sulit dikendalikan terlebih lagi ada siswa yang tidak memiliki GPK, situasi ini bisa menuntut kesabaran, kemampuan manajemen kelas yang baik, serta dukungan pihak sekolah. Evaluasi pembelajaran bagi siswa ABK juga belum memiliki mekanisme khusus dan masih berfokus pada kemampuan dasar seperti membaca, menulis serta berhitung. Guru kelas berupaya melalui setiap kemajuan kecil sebagai bentuk pencapaian signifikan dan menilai hasil belajar siswa ABK secara deskriptif agar lebih bisa mencerminkan perkembangan yang sebenarnya.

Sekolah ini juga belum menjalin kerjasama dengan dinas sosial, SLB ataupun komunitas disabilitas yang dapat memberikan dukungan profesional bagi pengembangan pendidikan inklusi, oleh karenanya pemanfaatan sumber daya eksternal

yang dapat memperkuat penerapan pendidikan inklusi belum bisa dioptimalkan. Tantangan utama yang sering muncul yaitu ketika siswa ABK memiliki kondisi yang lebih berat dan membutuhkan perhatian ekstra dari wali kelas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sangat perlunya ditingkatkan pemahaman serta keterampilan guru dalam menangani siswa dengan guru dalam menangani siswa dengan kebutuhan yang lebih kompleks.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, tentang pendidikan inklusif Permendiknas ini menekankan dan mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan/ kebutuhan khusus dan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Namun, di SD IKIP Komplek I Makassar, implementasi peraturan ini belum efektif. Guru belum menerima pelatihan khusus, melainkan mengandalkan pengalaman pribadi dan diskusi. Pihak sekolah juga belum menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti dinas sosial atau SLB. Secara keseluruhan, meskipun ada komitmen

awal, dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif yang efektif, sesuai dengan Permendiknas 70/2009.

Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran pada bagi siswa ABK pada SD IKIP I Makassar ini juga masih menjadi tantangan yang signifikan. Mekanisme evaluasi khusus belum tersedia, sehingga penilaian lebih fokus pada kemampuan dasar seperti membaca, menulis serta berhitung. Pendekatan ini dianggap kurang komprehensif dalam mengukur perkembangan siswa ABK secara holistik, karena mengabaikan aspek-aspek penting lainnya. Evaluasi formatif yang berkelanjutan dapat membantu guru memantau kemajuan ABK secara individual dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan (o'Neill, 2023) ini relevan dengan guru kelas di sekolah ini menunjukkan inisiatif yang positif dengan berupaya menghargai setiap kemajuan kecil yang dicapai siswa ABK sebagai bentuk pencapaian yang signifikan.

Pentingnya manajemen pendidikan inklusif yang efektif,

termasuk sistem evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa ABK. (Maryam, M., Yunus, M. & Safira, I. 2025) ini sejalan dengan upaya guru untuk menghargai setiap kemajuan kecil sebagai pencapaian yang signifikan dan menggunakan penilaian deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang perkembangan siswa ABK.

E. Kesimpulan

Implementasi pendidikan inklusi di SDN Kompleks Ikip I Makassar menunjukkan

bahwa penerapan inklusi di sekolah ini belum terstruktur sepenuhnya, namun sekolah ini menunjukkan adanya komitmen awal untuk memperbaiki kebijakan terkait penerapan pendidikan inklusi. Tidak adanya kebijakan khusus, proses PPDB yang belum terstandar, kurikulum yang belum tersesuaikan, fasilitas yang masih terbatas, kurangnya pelatihan guru, serta minimnya kerjasama dengan pihak eksternal menjadi penghambat utama.

Agar tercapainya pendidikan inklusi yang efektif, SD IKIP I Makassar perlu melakukan perbenahan yang

signifikan dalam berbagai aspek. Peningkatan kualitas SDM, penyediaan fasilitas yang memadai serta melakukan penguatan kerja sama dengan orang tua dan pihak eksternal ini bias menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif dan ramah bagi seluruh peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. D., Ardiansyah, M., & Mus, S. (2024). Pengelolaan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Quantum Brain Makassar. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 5(2), 109. <https://doi.org/10.26858/jak2p.v5i2.47280>
- Drs. Khairuddin, M. A. (2020). Pendidikan Inklusif Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Tazkiya*, 9(1), 82–102.
- Geraldine O'Neill, Eileen McEvoy, and T. M. (2023). *Challenges and opportunities in supporting the assessment literacy of educators and students*.
- Irvandi. (2024). *PERILAKU MENGAJAR GURU DALAM KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Studi: SMA N 10 Padang dan SMA N 15 Padang*. <http://scholar.unand.ac.id/482972/>
- Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.26904>
- Lestari, A., Setiawan, F., & Agustin, E. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Arzusin*, 2(6), 602–610. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v2i6.703>
- Mallappiang, N., & Soevian, A. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Sekolah Dan Masyarakat (Studi Kasus Sekolah Kharisma Makassar). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(11), 265–273. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Marsidi, A. (2022). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Makassar. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 5(1), 001–005. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v5n1.p001-005>

Maryam, M., Yunus, M., & Safira, I. (2025). Manajemen Pendidikan Inklusif Di UPT SPF SD Negeri Kalukuang II Makassar. *EduPrimaria of Journal*, 1(1), 46–53.
<https://journal.unibos.ac.id/epj/article/view/4339>

Rohimah, I., Rafiadilla, J., & Patras, Y. E. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Jenjang Pendidikan Dasar. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 10(1), 534–556.
<https://doi.org/10.31932/jpdp.v10i1.3250>

Syahraini Putri, A., Putri, D. M., & Ramadhina, V. (2024). Penerapan Model Pembelajaran Inklusi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 8(6), 2118–7303.

Wardani, A. K. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Negeri 016 Sungai Kunjang Samarinda. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2017(3), 44–58.